

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berangkat dari permasalahan mengenai rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan yang mumpuni sehingga pengangguran di Indonesia semakin banyak. Kurangnya pembelajaran ilmu pengetahuan mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada buruknya proses menghasilkan barang dan jasa. Kualitas ketenagakerjaan yang buruk merupakan masalah yang perlu segera ditangani agar tidak kalah dengan tenaga kerja asing. (Ulfa, 2018).

Kehadiran jenjang pendidikan yang berkedudukan tinggi dinilai sangat dibutuhkan mengingat tuntutan tingkat pendidikan dan keahlian yang semakin meningkat di masyarakat khususnya di dunia kerja. Masyarakat memanfaatkan berbagai lembaga pendidikan dan keahlian dengan berbagai kemampuan sesuai dengan kepentingan diri sendiri. Untuk mencapai kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu adanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. (Putri, 2018)

Menurut pengertiannya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ialah lembaga pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi dan produktivitas kerja di tingkat ketrampilan dan pengetahuan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB V Pelatihan Kerja. Dinas Tenaga Kerja diberikan kewenangan sebatas pendamping membantu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta baik dari segi pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 17 Tahun 2016 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang menyelenggarakan pelatihan

kerja untuk masyarakat setempat, memerlukan perizinan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Perizinan yang dimaksud pada ayat 1 ialah memperoleh nomor pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016)

Masyarakat selalu menginginkan bentuk pelayanan yang sebaik mungkin. Berdasarkan pendapat Sampara Lukma menjelaskan mengenai pelayanan ialah sebuah tindakan memberikan kepuasan pelanggan yang berarti melakukan interaksi langsung (Sinambela, 2014). Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk membuat inovasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Online Single Submission yang disingkat dengan OSS atau biasa disebut Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, peningkatan ekosistem ekonomi investasi dan kegiatan berusaha. (Faridah, 2021)

Sistem Online Single Submission yang disingkat dengan OSS atau biasa disebut Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan platform untuk Perizinan Berusaha yang dibuat oleh Lembaga OSS sendiri yang digunakan untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati/Wali Kota, Gubernur, yang ditujukan untuk para pelaku usaha dengan media elektronik yang terintegrasi.

Tujuan dari terbentuknya sistem OSS ini adalah guna mempermudah izin usaha dan mengurangi rumitnya proses penerbitan izin usaha di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di seluruh Indonesia khususnya izin usaha pusat dan daerah kota Ponorogo hanya melewati satu pintu yaitu sistem OSS.

Manfaat dari terbentuknya Sistem OSS adalah mempercepat pengurusan izin usaha, mulai dari izin lokasi, lingkungan, bangunan dan penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha di pusat dan daerah. Memberikan fasilitas pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam Nomor induk bangunan, memberikan fasilitas pelaku usaha supaya terhubung dengan pihak

yang memiliki kepentingan suatu perusahaan atau organisasi dan memperoleh persetujuan dengan aman dan cepat. (Oktavia, 2019)

Dalam implementasinya pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) peneliti mendapatkan berupa hambatan dan masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Peraturan Pemerintah Pusat yang berubah sehingga Kebijakan Daerah tidak dapat terlaksana dengan begitu baiknya..
2. Sebagian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang masih kurang memahami penggunaan internet atau mekanisme sistem OSS sehingga memperlambat proses permohonan.
3. Sosialisasi kemasyarakatan yang masih minim dalam langkah pengurusan izin usaha mikro kecil atau usaha pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **"Implementasi Pengurusan Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo"**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di latar belakang, peneliti merumuskan sebuah masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa dilihat dari 2 sisi yaitu dari sisi akademik dan sisi masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi akademik.

Membantu pengetahuan mahasiswa lain yang membutuhkan selain itu membantu referensi yang berguna bagi kampus.

2. Bagi masyarakat

Menyelesaikan permasalahan dengan kondisi permasalahan yang ada menggunakan metode keilmuan yang ada.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu baik dari pemerintah atau swasta dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan pada kebijakan. (Tahir, 2014)

2. Perizinan

Menurut peraturan perundang-undangan perizinan merupakan persetujuan dari penguasaan untuk dapat melakukan sebuah tindakan yang sudah ditentukan pada umumnya dilarang . (Manan, 2010).

3. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ialah badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Pelatihan kerja ialah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016).

F. Landasan Teori

1. Teori tentang Kebijakan

Istilah “Kebijakan” umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku kelompok atau individu di lapangan. Upaya dan tindakan terarah untuk mengatasi, mengurangi, mencegah, membalikkan, memperbaharui

dan mendorong munculnya kebaikan dengan cara yang sebaik-baiknya merupakan pemahaman tentang kebijakan publik. (Tahir A. , 2011).

2. Model implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor atau variabel yang masing-masing saling terkait. Model implementasi kebijakan VanMeter dan VanHorn menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling terkait:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan langkah-langkah praktis dalam kehadiran social-budaya pada tingkat implementasi kebijakan dan tingkat keberhasilan tujuan kebijakan. Jika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit untuk diimplementasikan.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap tahapan pelaksanaan membutuhkan personel yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang dipersyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik agen pelaksana

Fokusnya adalah pada organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh properti yang sesuai dan cocok dengan agen implementasi.

d. Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan dan bagaimana mereka memandang dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi mereka sendiri.

e. Komunikasi antar organisasi

Menurut VanHorn dan VanMater, individu perlu memahami tujuan standar agar dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan harus mengkomunikasikan standar dan tujuan tersebut kepada pelaksana. Komunikasi dalam memberikan informasi untuk implementasi kebijakan standar dan target perlu dilakukan secara konsisten dan konsisten di berbagai sumber.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika menilai kinerja implementasi kebijakan adalah seberapa besar kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan masalah kinerja implementasi kebijakan yang buruk. Oleh karena itu, proses implementasi kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang valid. (Rachmastika, 2018).

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah panduan implementasi untuk mengukur variabel. Dengan kata lain merupakan penjelasan atau pedoman atas konsep yang ada dan dirumuskan dalam bentuk variabel indikator untuk memudahkan penelitian. Alat yang dapat diukur dan diamati adalah suatu objek yang memungkinkan peneliti untuk mengamati atau mengukur secara cermat fenomena yang bersangkutan. Penelitian ini mempunyai indikator yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan terkait pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - a. Standart dan sasaran kebijakan
 - b. Sumber daya
 - c. Karakteristik agen pelaksana
 - d. Sikap Atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
 - e. Komunikasi antar organisasi

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

H. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Pemilihan lokasi dari penelitian ini sudah mempertimbangkan yang semestinya sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada skripsi ini. Maka obyek penelitian ini adalah pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jl. Budi Utomo Ponorogo. Penelitian ini dilakukan kepada pihak bidang pelatihan dan produktivitas kerja yang terkait dengan masalah perizinan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. metode kualitatif adalah metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2016).

3. Sumber Data

Data adalah fakta yang dikumpulkan untuk analisis, pembahasan, hasil ilmiah, atau pengujian statistik. Dalam implementasi sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang dapat diterima apa adanya. Pernyataan ini merupakan hasil pengukuran atau pengamatan terhadap suatu variabel dan dapat berupa angka, kata, atau gambar. Data tersebut kemudian diproses sedemikian rupa sehingga orang lain yang belum pernah mengalaminya dapat memahaminya. Oleh karena itu, data mutlak diperlukan sebagai bahan analisis dalam setiap penelitian.

Data juga secara umum diartikan sebagai kumpulan informasi yang dikumpulkan dari proses pengamatan. Data tersebut dapat berupa angka atau simbol. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. (Slamet Riyadi, 2014).

Data primer adalah data lapangan yang diambil langsung dari aktor yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data primer, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi dan wawancara. Disini, peneliti terlibat dalam segala aspek dalam memperoleh izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, serta mereka yang terlibat dalam memperoleh izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk mendapatkan data yang relevan.

4. Teknik Pengambilan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dengan menggunakan teknik purposive sampling maka penggalan informasi dilakukan tidak secara acak, melainkan dengan sengaja memilih informan dalam penelitian. Pelapor diidentifikasi dengan memilih sumber yang mungkin memberikan data dan informasi terlengkap.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan yang mungkin akan dimintai informasi dalam penelitian ini adalah Kepala seksi bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan Kepala Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

5. Teknik pengumpulan data

Langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian yakni teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menjadi sangat penting karena berguna untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2015). Metode yang digunakan peneliti adalah dengan datang langsung ke lapangan (field research), memusatkan perhatian pada subjek penelitian, dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Segala ilmu pengetahuan mempunyai dasar yang biasa kita sebut dengan Observasi. Berdasarkan pendapat di atas, melalui observasi, penulis dapat memperoleh data yang lebih akurat atau jelas tentang masalah yang diteliti dan memberikan gambaran yang lengkap tentang

objek yang diteliti. Selain observasi, penulis dapat mengamati secara langsung kegiatan dan kejadian subjek penelitian. Penulis juga menerima data faktual sesuai dengan situasi di lapangan. (Sugiyono, 2015)

Observasi dilakukan untuk mengamati lebih mendalam dengan bagaimana kebijakan dinas tenaga kerja Ponorogo terkait dengan penerapan sistem OSS dalam pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

b. Wawancara

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2015) menjelaskan mengenai salah satu teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara yang berarti melakukan interaksi dengan bertukar informasi secara lisan antara narasumber dan pencari informasi mengenai masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2015)

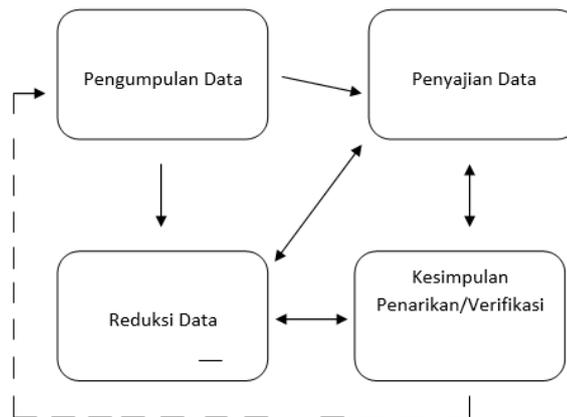
Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan langsung kepada Kepala Seksi Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kepala Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu. Bentuk dari dokumen ini sangat bermacam-macamnya dapat berupa teks manusia, foto, atau karya monumental (Sugiyono, 2015). Dokumen yang berbentuk tulisan antara lain seperti buku harian, sejarah hidup, cerita, biografi, dan peraturan. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti dari suatu kegiatan yang dapat didokumentasikan.

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari peneliti tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam dan hasil penelitian tersebut dapat dipahami. Menurut Milles dan Huberman langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu:



Gambar 1 Skema dalam Analisis Data

Skema dalam analisis data (interactive model) Miles dan Huberman
(Sugiyono, 2014).

a. Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan pencatatan untuk memperoleh data yang diinginkan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap pemilihan dengan pemikiran yang lebih mendalam. Hasil wawancara bisa di diskusikan dengan orang lain, sehingga peneliti dapat mengembangkan pemikiran dan data yang di reduksi memiliki nilai besar dalam pengembangan pengetahuan dan teori.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan, verifikasi dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data umumnya dilakukan pada bentuk uraian singkat, skema dan rancangan untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Proses penyajian data juga

dilakukan dengan menampilkan data secara sistematis untuk memberikan kemudahan saat dipahami dan diteliti.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses akhir pengumpulan data adalah validasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai data yang ditampilkan. Metode yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan adalah dengan mencatat masalah atau pola yang sama, mengelompokkannya, dan mencari perbedaan dari yang lain.

